

PBB PERLU BERI SANKSI Israel Lakukan Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA (KR) - Sikap brutal yang dipertontonkan Israel terus mengundang kecamaran banyak pihak, termasuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PIIP). Kedua organisasi ini mengutuk kekejaman Israel di Palestina. ICMI dan PIIP meminta agar PBB dan masyarakat internasional yang cinta damai menghentikan aksi Tentara Zionis Israel dan memberi sanksi, baik politik-militer maupun ekonomi.

"ICMI meminta para pemimpin dunia bersatu menyelamatkan warga Palestina. ICMI mendesak Pemerintah Amerika Serikat yang selama ini menggembar-gemborkan penegakan nilai demokrasi untuk melakukan tindakan nyata menekan Israel," tandas Ketua Umum ICMI Prof Dr Jimly Assidique dan Sekjen Dr Mohammad Jafar Hafsah dalam pernyataan sikap yang ditandatangani, Senin (17/5).

Ketua PIIP Prof Dr Din Syamsuddin dalam siaran persnya juga mendesak Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam, khususnya negara-negara Arab untuk menunjukkan solidaritas dan simpati nyata terhadap perjuangan Rakyat Palestina untuk memerdekakan diri. Mereka juga harus mendesak Israel untuk meninggalkan wilayah Palestina/Arab yang didudukinya secara ilegal.

"Negara-negara Arab agar mengesampingkan egoisme dan kepentingan terbatas mereka," tegasnya. *(Berita terkait Palestina di Halaman 15)*

Ia menyatakan, masyarakat yang cinta damai mengutuk keras tindakan brutal tentara Zionis Israel yang merupakan pelanggaran HAM berat, pelanggaran resolusi-resolusi PBB dan hukum internasional.

* Bersambung hal 7 kol 1



Para pelayat membawa jenazah warga Palestina Wajdi Jaafrah yang terbunuh oleh pasukan Israel pada hari Sabtu dan dimakamkan Minggu (16/5).

KR-Antara/Reuters

Kuartal I 2021, Masuk 10 Besar Nasional

Pertumbuhan Ekonomi DIY, Terbaik se-Jawa

YOGYA (KR) - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlanjut di kuartal I 2021, ekonomi DIY justru bertumbuh, bahkan satu-satunya daerah (provinsi) yang positif di Pulau Jawa dan masuk 10 besar nasional. Positifnya pertumbuhan, yakni sebesar 6,14 persen banyak ditopang oleh tingginya aktivitas lapangan usaha informasi dan komunikasi (LU Infokom) sebagai dampak dari aktivitas dunia pendidikan dan transaksi digital, serta bagus kinerja pertanian di DIY di masa panen raya. Peran Pemda DIY melalui kebijakannya berpengaruh dalam meraih capaian tersebut.

Masuknya DIY dalam 10 besar provinsi yang tumbuh positif selama kuartal I 2021, diungkapkan dalam Video Conference Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah kepala daerah, Senin (17/5). Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengikuti acara terse-

but dari Gehong Pracimasana, Kompleks Kepatihan mengungkapkan, kendati pertumbuhan ekonomi DIY dan sembilan daerah lainnya di Indonesia tumbuh positif, DIY tetap masih perlu berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena sebelumnya pertumbuhannya sempat minus. Bahkan berdasarkan data data 2020, di kuartal terakhir, pertumbuhan ekonomi DIY minus 2,59 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemda DIY agar pertumbuhan ekonominya bisa tumbuh positif.

"Dalam paparannya, Presiden Jokowi menyampaikan dua hal pokok, yaitu soal Covid-19 dan masalah ekonomi. Memang untuk pertumbuhan ekonomi nasional belum bisa dikatakan mengembirakan, karena ekonomi Indonesia masih minus 2,93 persen. Angka tersebut menjadi pencerminan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah. Jadi harapannya ekonomi daerah-

daerah makin baik, sehingga ekonomi nasional bisa tumbuh positif," kata Sultan.

Sultan berharap ekonomi nasional sehingga juga bisa tumbuh positif. "Untuk itu kita dituntut bisa mencapai angka 7 persen nanti di kuartal kedua," ujar Sultan.

Sementara itu Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana menyampaikan DIY menjadi satu-satunya di Jawa yang ekonominya tumbuh baik kuartal per kuartal maupun yoy-nya positif. "Banyak provinsi yang ekonominya tumbuh secara kuartal-

nya positif tapi yoy minus. Pertumbuhan DIY yang mencapai 6,14 persen pada triwulan I 2021 ini atau positif keempat setelah Papua 14,28 persen Maluku Utara sebesar 13,45 persen dan Sulawesi Tengah sebesar 6,26 persen," ujarnya. **(Ria/Ira) -d**

10 provinsi yang ekonominya tumbuh positif di Triwulan I 2021:

| | | |
|-----|----------------------|--------------|
| 1. | Papua | 14,28% |
| 2. | Maluku Utara | 13,45% |
| 3. | Sulawesi Tengah | 6,26% |
| 4. | DI Yogyakarta | 6,14% |
| 5. | Sulawesi Utara | 1,87% |
| 6. | Papua Barat | 1,47% |
| 7. | Kep. Bangka Belitung | 0,97% |
| 8. | Riau | 0,41% |
| 9. | Nusa Tenggara Timur | 0,12% |
| 10. | Sulawesi Tenggara | 0,06% |

Grafis JOS



KR-Riyana Ekawati

Sultan HB X

**Analisis KR
Larangan Mudik
dan UMKM**
Dr Y Sri Susilo

KEBIJAKAN larangan mudik yang diterapkan pemerintah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021 tentu berdampak dari sisi ekonomi. Kebijakan tersebut berdampak negatif dan langsung terhadap usaha/bisnis transportasi (darat, laut dan udara). Menurut Organda (2021), kebijakan tersebut menjadikan operator bus berpotensi tidak memperoleh pendapatan.

* Bersambung hal 7 kol 4

| Tanggal | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | Subuh |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Selasa, 18 Mei 2021 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:43 | 04:23 |

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DOMPET 'KR'
Bersama Kita Melawan Virus Korona
Migunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972.

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

| NO | NAMA | ALAMAT | RUPIAH |
|---------------|-------|--------|----------------------|
| 917 | Bebby | | 100.000,00 |
| JUMLAH | | | Rp 100.000,00 |

s/d 16 Mei 2021 Rp 470.636.965,00
s/d 17 Mei 2021 Rp 470.736.965,00
(Empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

(Siapa menyusul?)

HASIL TES WAWASAN KEBANGSAAN Tak Bisa Berhentikan 75 Pegawai KPK

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung penuh pemerintah soal polemik 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK.

"Kami mendukung penuh perintah terkait alih status pegawai KPK," tegas Yudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/5). Ia termasuk dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Untuk itu, Yudi mengapresiasi Presiden Jokowi yang tetap menjaga semangat pemberantasan korupsi dan tidak membiarkan KPK diperlemah. "Alhamdulillah terima kasih Pak Presiden Jokowi menjaga semangat pemberantasan korupsi dan tidak membiarkan KPK diperlemah," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, hasil TWK tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK. "Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah per-



KR-Antara/M Risyah Hidayat

Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

baikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk pemberhentian 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden melalui channel Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

Seperti diberitakan, pengumuman hasil TWK pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK, * Bersambung hal 7 kol 1

DIDUGA TETAP MUDIK 134 ASN Terancam Sanksi

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi terhadap 134 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar aturan mudik saat masa cuti bersama dan liburan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M.

"Mohon yang masuk dalam sistem LAPOR! segera diselidiki dan ditindaklanjuti. Jika memang terbukti bersalah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberi sanksi," tandas Tjahjo Kumolo di depan jajarannya di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (17/5).

Diungkapkan, LAPOR! merujuk pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-La-

yanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Sistem LAPOR! telah menerima 160 laporan dari masyarakat selama periode cuti bersama dan liburan Hari Raya Idul Fitri. Namun, hanya 134 Pegawai Negeri Sipil atau ASN yang diadukan pulang ke kampung halamannya. Sisanya, laporan itu terkait permohonan informasi dan aspirasi.

Menanggapi laporan tersebut, Tjahjo Kumolo meminta instansi yang bersangkutan segera mengklarifikasi laporan 134 ASN mudik sehingga sanksi berupa hukuman disiplin dapat segera dijatuhkan jika mereka terbukti melanggar aturan. **(Ati/San) -d**

**SUNGGUH
Terjadi**

● **UNTUK** menghemat uang saku saat kuliah di perantauan, saya sahur dengan mi instan. Waktu stok mi instan saya habis, ada teman satu kos yang menawarkan membuatkan bubur instan. Ketika bubur sudah jadi, saya pikir bubur itu adalah bubur nasi dengan taburan abon di atasnya. Ternyata teman saya membuatkan bubur bayi rasa pisang. (Nurma Miftachul J, Jalan Benteng Pancasila 80, RT 003 RW 004 Balongsari, Magersari Mojokerto 61314) -d

LAYANAN DOCCALL
Konsultasi Dokter Melalui Video Call
HOTLINE : 081218037770

Kembali beraktivitas di perkantoran, wajib terapkan Prokes Covid-19

RS PKU Bantul
Layanan Skrining Covid-19
Tes GeNose
Jam 08.00-14.00
Pendaftaran : 08123 638 678

DATA KASUS COVID-19 **Senin, 17 Mei 2021**

| 1. Nasional: | 2. DIY: |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| - Pasien positif : 1.744.045 (+4.295) | - Pasien positif : 42.142 (+136) |
| - Pasien sembuh : 1.606.611 (+5.754) | - Pasien sembuh : 38.696 (+170) |
| - Pasien meninggal : 48.305 (+212) | - Pasien meninggal : 1.076 (+8) |

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY. (KR-Ria/Ira)